



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **WIBAWA PRAM SIHOMBING**
2. Jabatan : **KEPALA KANTOR WILAYAH**
3. NHK : **100929**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.370.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/125 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 610.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 213 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
3. Tanah Seluas 152 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/73 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 770.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 610.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 80.000.000

1. MOBIL, HONDA MOBILIO RS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 870.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 509.678.120

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.021.072.994

F. HARTA LAINNYA Rp. 871.961.283

Sub Total Rp. 5.722.712.397

III. HUTANG Rp. 232.202.120

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.490.510.277



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MISAIL PALAGIA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA
3. NHK : 404431

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/96 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASAR BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 82.500.000

1. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 11.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 58.200.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.251.700.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.251.700.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANWAR SULAIMAN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG LELANG
3. NHK : 267833

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/99 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 198.500.000

1. MOTOR, YAMAHA XEON Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Z Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
3. MOBIL, TOYOTA F654RM-GQSFJ Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
4. MOTOR, HONDA V1J02Q50L1 A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 10.900.705

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 909.400.705

III. HUTANG Rp. 545.153.570

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 364.247.135

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : CATUR SETIONO
2. Jabatan : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON
3. NHK : 943342

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.370.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 164 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 970.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	240.000.000
1. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	56.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	408.170.713
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	10.519.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.085.189.713
III. HUTANG	Rp.	421.535.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.663.654.713

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOCH. FAJAR ADCHA
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM
3. NHK : 436421

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/175 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000
2. Tanah Seluas 1.500 m2 di KAB / KOTA WAJO, Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 387.500.000

1. MOBIL, HONDA NEW CRV Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
3. LAINNYA, BROMPTON CHPT-3 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 55.500.000
4. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 350.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 368.520.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.906.020.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.906.020.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOHAMAD ARIEF WIDODO
2. Jabatan : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DUMAI
3. NHK : 824738

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **726.570.317**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 348.623.425
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/27 m2 di KAB / KOTA LEBAK, HASIL SENDIRI Rp. 190.059.500
3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/27 m2 di KAB / KOTA LEBAK, HASIL SENDIRI Rp. 187.887.392

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **142.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA 1.3 M/T / MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
2. MOTOR, HONDA NC11B3C AT / HONDA BEAT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
3. MOTOR, HONDA NF 125 KARISMA Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOTOR, HONDA AFP12W21C03 MT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
5. MOTOR, HONDA F1C02N46L0 AT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 19.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **21.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **405.000.000**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.295.070.317

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.295.070.317

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NANDANG SUPRIYADI**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG KEPATUHAN INTERNAL, HUKUM, DAN INFORMASI**
3. NHK : **124798**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 856.350.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 344 m2/132 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 391.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1.928 m2/4 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI , Rp. 100.100.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/1 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 150.500.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 188 m2/1 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 55.250.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/1 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 44.250.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/1 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 35.250.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/1 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 59.000.000**

1. MOBIL, HYUNDAI TRAJET MPV Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 34.900.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 24.100.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 55.352.500**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	380.700
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	15.336.150
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	986.419.350
III. HUTANG	Rp.	184.401.937
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	802.017.413

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NURJANTO
2. Jabatan : PEJABAT FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH MADYA
3. NHK : 123649

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **5.141.050.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 187 m2/200 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 101 m2/70 m2 di KAB / KOTA JOMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
3. Tanah Seluas 1.067 m2 di KAB / KOTA LAMONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 533.500.000
4. Tanah Seluas 1.006 m2 di KAB / KOTA LAMONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 754.500.000
5. Tanah Seluas 374 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 374.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 1.125.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 474 m2/120 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000
8. Tanah Seluas 1.606 m2 di KAB / KOTA LAMONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 321.200.000
9. Tanah Seluas 83 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
10. Tanah Seluas 76 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 64.600.000
11. Tanah Seluas 82 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI



Rp. 69.500.000

12. Tanah Seluas 86 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI

Rp. 73.100.000

13. Tanah Seluas 89 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI

Rp. 75.650.000

14. Tanah Seluas 2.597 m2 di KAB / KOTA JOMBANG, HASIL

SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 7.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. 5.600.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 617.704.386

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 5.771.354.386

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.771.354.386

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.